

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Permasalahan pertumbuhan penduduk menjadi tantangan yang serius yang dihadapi oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menyebabkan berbagai permasalahan seperti kepadatan penduduk, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, angka pengangguran tinggi, serta degradasi lingkungan. Dalam hal ini pemerintah melakukan strategi dengan mencanangkan program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) yang bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendekatan yang berbasis komunitas.

Program Kampung Keluarga Berkualitas dirancang sebagai strategi integratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Program ini tidak hanya berfokus pada pengendalian penduduk melalui program keluarga berencana, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan keluarga. Sesuai dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2022 yang berfokus pada optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dengan harapan bahwa pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas bisa lebih efektif. Dengan adanya instruksi ini, kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas dapat dilakukan secara bersama-sama dan berkoordinasi yang mencakup semua dimensi pemberdayaan dan penguatan keluarga.

Berdasarkan penelitian kualitatif yang telah dilakukan peneliti mengenai “Modal Sosial dalam *Collaborative Governance* pada Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur” yang menggunakan teknik wawancara, observasi, *Focus Group Discussion* dan dokumentasi dengan informan yang memenuhi klasifikasi penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui modal sosial dalam *collaborative governance* pada Program Kampung Keluarga Berkualitas. Modal sosial yang dalam penelitian yang dilakukan menggunakan teori Robert Putnam (1993) yang meliputi aspek kepercayaan, jejaring, dan norma.

Hasil penelitian yang ditunjukkan memperoleh hasil bahwa modal sosial pada aspek membangun kepercayaan dalam *collaborative governance* pada program Kampung Keluarga Berkualitas menunjukkan bahwa membangun kepercayaan dalam kelompok kerja merupakan elemen krusial dalam mendukung keberhasilan Program Kampung Keluarga Berkualitas. Keterbukaan komunikasi dan transparansi menjadi pondasi utama dalam membangun kepercayaan antar anggota kelompok kerja. Melalui komunikasi yang jujur dan terbuka, informasi dapat disampaikan secara akurat dan transparan, yang memungkinkan anggota kelompok kerja untuk memahami tujuan dan proses yang sedang berlangsung, sehingga meningkatkan rasa saling percaya di antara mereka.

Dalam temuan penelitian, peran pemimpin juga sangat signifikan dalam memperkuat kepercayaan. Pemimpin yang aktif dalam melakukan koordinasi dan komunikasi baik dengan kelompok kerja maupun dengan stakeholder lainnya mampu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kolaborasi. Kepemimpinan

yang efektif ini mencakup pengorganisasian kegiatan, penyebaran informasi yang tepat waktu, dan pengelolaan hubungan dengan masyarakat dan *stakeholder* lainnya. Komunikasi yang terjalin dengan masyarakat juga ditunjukkan melalui interaksi dua arah yang terjadi dalam berbagai kegiatan program Kampung Keluarga Berkualitas. Hal ini mencerminkan hubungan yang baik antara kelompok kerja dan masyarakat, dimana informasi dan masukan dari masyarakat diperhatikan dan ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam program bukan hanya formalitas, tetapi mereka dilibatkan secara aktif dan suaranya didengar.

Keterbukaan komunikasi juga tercermin dalam proses birokrasi perizinan. Pengurusan izin dan persetujuan kegiatan dilakukan dengan transparan dan melibatkan berbagai pihak terkait, sehingga memperkuat kepercayaan antara kelompok kerja dan institusi birokrasi. Pengambilan keputusan dalam program ini dilakukan melalui rapat terbuka yang melibatkan seluruh anggota kelompok kerja secara partisipatif. Setiap anggota memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya, yang menjamin bahwa keputusan yang diambil mencerminkan konsensus bersama dan tidak ada pihak yang merasa diabaikan. Secara keseluruhan, strategi yang dilakukan dalam membangun kepercayaan mencakup komunikasi yang terbuka, kepemimpinan yang aktif dan inklusif, serta pengelolaan hubungan yang baik dengan masyarakat dan *stakeholder* lainnya. Dengan demikian, kepercayaan yang terbangun di antara anggota kelompok kerja dan *stakeholder* dapat mendukung tercapainya tujuan Program Kampung Keluarga Berkualitas secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam temuan penelitian terdapat beberapa permasalahan yang perlu untuk diatasi, seperti tidak adanya penjadwalan yang pasti untuk pertemuan rutin dan kurangnya partisipasi dari beberapa anggota kelompok kerja dalam melakukan kegiatan di program Kampung Keluarga Berkualitas. Hal ini akan berdampak pada proses keberlanjutan program karena membutuhkan partisipasi aktif kelompok kerja dalam melaksanakan program Kampung Keluarga Berkualitas sehingga dampak positif yang dirasakan dari adanya program yang diberlakukan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Pada aspek jejaring yang dilakukan dalam *collaborative governance* ditemukan bahwa telah memainkan peran yang signifikan dalam memfasilitasi kerjasama yang efektif dan pencapaian tujuan program. Jejaring ini mencakup berbagai pemangku kepentingan, termasuk kelompok kerja, masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta, yang semuanya terlibat aktif dalam pertukaran informasi, sumber daya, dan dukungan. Melalui jejaring sosial yang kuat, hubungan kepercayaan antara pemangku kepentingan yang telah terbentuk, melalui komunikasi yang lebih terbuka dan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Keberadaan jejaring ini dapat memudahkan mobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk mendukung berbagai kegiatan di Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Kelapa Dua Wetan. Dengan adanya jaringan yang terstruktur, setiap pihak dapat berbagi tanggung jawab dan berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, sehingga program dapat berjalan secara lebih efisien dan efektif. Dalam hal ini, jejaring yang dilakukan dalam *collaborative governance* di program Kampung Keluarga Berkualitas tidak hanya memperkuat kerjasama antar

pemangku kepentingan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui implementasi program yang lebih baik dan berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa modal sosial dalam bentuk jejaring dan hubungan kepercayaan adalah komponen penting yang mendukung keberhasilan program-program komunitas.

Pelaksanaan norma dalam *collaborative governance* pada Program Kampung Keluarga Berkualitas, ditemukan bahwa keberadaan norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, sangat esensial dalam mendukung kerjasama yang efektif. Norma tertulis mencakup aturan formal yang harus diikuti oleh kelompok kerja dan semua pihak yang terlibat dalam kolaborasi. Aturan ini dapat berupa pedoman Kampung Keluarga Berkualitas yang dikeluarkan oleh BKKBN berisikan prosedur operasional, pedoman kerja, dan pedoman rumah anak sigap yang dikeluarkan oleh tanoto foundation yang berisikan pedoman pembentukan dan pengelolaan kelompok dukungan anak, pedoman edukasi pencegahan kekerasan pada anak, dan prosedur penanganan anak yang bermasalah dengan hukum. Pedoman yang dimiliki ini bertujuan untuk mengarahkan tindakan-tindakan spesifik yang mendukung dalam pelaksanaan keberhasilan program. Di sisi lain, norma tidak tertulis berperan dalam menciptakan iklim kerja yang kondusif melalui etika kerja, nilai-nilai sosial, dan kebiasaan yang telah tertanam di dalam komunitas. Norma-norma ini meliputi cara berinteraksi, berbagi informasi, dan menghargai perbedaan pendapat yang tidak hanya memperkuat hubungan antar anggota kelompok kerja tetapi juga antara kelompok kerja dan masyarakat setempat. Dengan adanya pemahaman dan kepatuhan terhadap norma-norma ini, komunikasi dan koordinasi dapat berlangsung dengan lebih lancar, yang pada akhirnya memperkuat kolaborasi

dan mendukung pencapaian tujuan bersama. Namun, kepatuhan terhadap norma-norma ini tidak selalu berjalan mulus. Ketidakpatuhan terhadap norma, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dapat mengganggu harmoni dan efisiensi kolaborasi. Oleh karena itu, dalam program ini diterapkan mekanisme sanksi teguran bagi pihak-pihak yang melanggar aturan. Sanksi teguran ini bertujuan untuk memperingatkan dan mengarahkan kembali individu atau kelompok yang bersangkutan agar kembali mematuhi norma yang telah disepakati, serta untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang lebih serius di masa depan. Secara keseluruhan, norma-norma yang ada memainkan peran kunci dalam menjaga disiplin dan tanggung jawab, yang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas collaborative governance di Program Kampung Keluarga Berkualitas. Dengan adanya norma yang dipatuhi oleh semua pihak, program ini dapat berjalan dengan lebih baik, meningkatkan kepercayaan antar stakeholder, dan mencapai tujuan utama yaitu peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Hasil temuan pada aspek harapan menunjukkan bahwa Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Kelapa Dua Wetan telah memberikan dampak langsung yang signifikan bagi masyarakat. Program-program seperti Rumah Anak Sigap, Senam Sehat Diaspora, Tanaman Hidroponik, dan Budidaya Bibit Ikan Lele telah berjalan dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat. Keberhasilan program ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif mereka. Namun, dalam evaluasi program Rumah Anak Sigap, ditemukan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui keberadaan dan

manfaat program ini. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam sosialisasi dan penyebaran informasi, yang perlu ditingkatkan agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dari program yang ada. Selain itu, terdapat banyak harapan yang diungkapkan oleh masyarakat terkait dengan pelaksanaan kolaborasi dalam program ini. Harapan-harapan tersebut mencakup peningkatan kemandirian keluarga, pemahaman yang lebih baik mengenai penggunaan alat kontrasepsi (KB), serta peningkatan peran orang tua dalam pengasuhan anak. Masyarakat menginginkan agar program-program ini dapat membantu mereka menjadi lebih mandiri dan berdaya dalam mengelola kehidupan keluarga mereka, serta memperkuat peran keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan anak-anak mereka.

Keseluruhan pada temuan ini menegaskan pentingnya dalam mengembangkan dan memperbaiki program-program Kampung Keluarga Berkualitas melalui kolaborasi yang efektif, komunikasi yang lebih baik, dan sosialisasi yang lebih intensif. Dengan demikian, diharapkan seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat secara menyeluruh dan program-program yang ada dapat berjalan dengan lebih efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kelurahan Kelapa Dua Wetan.

Permasalahan yang timbul, peneliti mengusulkan program dengan sasaran kelompok kerja melalui kegiatan pelatihan dan pengembangan kapasitas kelompok kerja. Program ini dirancang untuk memperkuat kompetensi dan komitmen anggota kelompok kerja melalui kegiatan pelatihan perencanaan dan manajemen dalam membuat suatu program yang berdampak kepada masyarakat sesuai dengan tujuan Kampung Keluarga Berkualitas serta mendorong inovasi dan kreativitas kelompok

kerja dalam mengembangkan ide-ide baru dalam mengatasi tantangan yang ada dan dapat memperbaiki implementasi program pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas. Lalu kegiatan yang dilakukan lainnya adalah sosialisasi program Rumah Anak Sigap dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya peran orang tua dalam pengasuhan anak serta pentingnya kesehatan dan pendidikan anak. Dalam usulan program yang akan dilaksanakan memuat dasar pemikiran, nama program, tujuan program, sasaran program, pelaksana program, metode dan teknik yang digunakan, kegiatan yang dilakukan, rencana anggaran biaya, langkah-langkah pelaksanaan, analisis kelayakan program, dan indikator keberhasilan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai “Modal Sosial dalam *Collaborative Governance* pada Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur” ditemukan permasalahan yang belum terpecahkan sehingga peneliti mengajukan saran yang terbagi menjadi dua bagian, sebagai berikut:

6.2.1 Saran Guna Laksana

1. Bagi Pihak Kelurahan Kelapa Dua Wetan , berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diharapkan dapat memainkan peran yang lebih aktif dan strategis dalam mendukung keberhasilan program Kampung Keluarga Berkualitas. Sebagai pihak yang memiliki otoritas dan akses terhadap berbagai sumber daya, kelurahan dapat menjadi fasilitator utama dalam

mengkoordinasikan program dan memastikan keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, lembaga pemerintah, dan mitra swasta. Serta penting bagi kelurahan untuk memperkuat dukungan kebijakan dengan memastikan bahwa semua kegiatan dan program Kampung KB selaras dengan kebijakan dan rencana pembangunan daerah, sehingga dapat memberikan dampak jangka panjang yang berkelanjutan. Dengan peran yang lebih aktif dan terkoordinasi, Kelurahan Kelapa Dua Wetan dapat membantu memaksimalkan potensi program Kampung Keluarga Berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

2. Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Kelapa Dua Wetan, berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, diharapkan dapat memperkuat modal sosial dalam hubungan personal dan profesional di antara kelompok kerja dalam pelaksanaan program-program Kampung Keluarga Berkualitas. Dengan modal sosial yang kuat dan pendekatan *collaborative governance* yang dilakukan dalam program Kampung Keluarga Berkualitas dapat menjadi berkelanjutan dan menjadi fondasi bagi terciptanya program Kampung Keluarga Berkualitas yang lebih inovatif, adaptif, dan memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat Kelapa Dua Wetan sehingga mengurangi isu permasalahan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
3. Masyarakat Kelurahan Kelapa Dua Wetan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diharapkan untuk lebih aktif dalam berpartisipasi dalam

kegiatan yang diadakan oleh Kampung Keluarga Berkualitas. Keterlibatan aktif ini penting untuk memastikan bahwa program-program yang sudah dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dengan keterlibatan aktif masyarakat dapat menekan angka laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

6.2.2 Saran Penelitian Lanjutan

1. Pada penelitian berikutnya dapat berfokus pada evaluasi dampak jangka panjang dari implementasi *Collaborative Governance* dalam program Kampung Keluarga Berkualitas. Penelitian ini dapat mengkaji apakah peningkatan modal sosial melalui kolaborasi antara kelompok kerja, pemerintah, dan masyarakat berdampak pada hasil jangka panjang seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Penelitian juga dapat mengevaluasi keberlanjutan program dan bagaimana kolaborasi dapat diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan lokal.
2. Dalam melakukan penelitian lanjutan dapat melakukan penelitian komparatif dengan lokasi lain yang juga menerapkan program serupa sehingga dapat memberikan wawasan tambahan. Studi ini bisa membandingkan efektivitas modal sosial dan *Collaborative Governance* di Kelurahan Kelapa Dua Wetan dengan daerah lain yang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang berbeda. Penelitian ini bisa mengidentifikasi praktik terbaik dan tantangan yang mungkin muncul di berbagai konteks, yang kemudian bisa dijadikan

panduan untuk meningkatkan program di Kelapa Dua Wetan dan daerah lainnya.